



Buletin

Parlementaria

Nomor 991/III/2018 • Januari 2018

**Satgas Pangan Diminta Selidiki
Penyebab Tingginya Harga Beras**

**Bulog Harus Atasi
Defisit Beras**



**Bambang Soesatyo
Resmi Duduki Jabatan
Ketua DPR RI**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339005



Suasana Rapat Paripurna Pelantikan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI

Bambang Soesatyo Resmi Duduki Jabatan Ketua DPR RI

Bambang Soesatyo, yang populer juga dikenal dengan Bamsoet akhirnya resmi menduduki kursi Ketua DPR RI, setelah dilantik dan diambil sumpahnya pada Rapat Paripurna DPR RI. Dihadiri pimpinan dan para anggota DPR, Wakapolri, Jaksa Agung, serta keluarganya sendiri, Bamsoet menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1) itu, sangat ditunggu-tunggu publik. Karena salah satu agendanya berisikan pelantikan Ketua DPR baru. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin rapat, membacakan langsung surat keputusan pemberhentian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat

masuk dari DPP Partai Golkar yang resmi mengajukan nama Bamsoet sebagai pengganti Setya Novanto.

Bamsoet diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan disaksikan langsung para Wakil Ketua DPR RI. “Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e UU No.17/2014 tentang MD3 diubah menjadi UU No.42/2014 yang intinya

berbunyi Pimpinan DPR RI berhenti dari jabatannya karena diberhentikan,” kata Agus saat membacakan surat keputusan pada Rapat Paripurna itu.

Agus juga menyampaikan, dengan dilantiknya Ketua DPR RI yang baru, diharapkan lembaga ini bisa semakin kuat dibawah kepemimpinan sosok baru ini. Bamsoet menduduki jabatan Ketua DPR yang sempat lowong beberapa



Foto: Dhuhi/br

lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini berjanji di hadapan Rapat Paripurna, akan melaksanakan amanah mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dikatakannya, DPR harus menjadi simbol dan cita-cita ideal Bangsa Indonesia.

“Walaupun harus diakui bahwa selama ini, idealisasi semacam itu masih terasa jauh, namun kita tidak boleh berputus asa. Kita menyadari bahwa kaum politisi di lembaga terhormat ini masih sering dikritik dari kiri dan kanan. Semua ini harus kita terima dengan besar hati dan kita jadikan tekad untuk berbuat yang lebih baik lagi,” ucap Bamsoet.

Politisi Golkar itu berharap, di masa mendatang, DPR harus menjadi lembaga yang representatif, harmonis, sekaligus produktif. Dengan begitu, demokrasi akan berkembang dengan matang. DPR, lanjutnya, juga merupakan simbol kemajemukan masyarakat Indonesia. Senayan adalah pelangi Indonesia.

“Di sinilah kita bertemu dengan semua spektrum politik kebangsaan kita. Kita harus merawat keragaman ini, sambil berupaya agar masyarakat Indonesia yang diwakilinya mampu untuk terus melangkah mengejar kemajuan bersama,” tuturnya penuh keyakinan.

Ditambahkannya, DPR sekarang adalah DPR di zaman *now* yang selalu menjadi sorotan. Pergerakan zaman perlu diikuti sekaligus mengadopsi tuntutan zaman baru. Mantan wartawan itu mengimbau agar semua elemen terutama di DPR, tak tenggelam dalam zaman yang sudah lewat.

“Dalam waktu sisa jabatan yang tidak terlalu lama, saya juga akan berupaya memperkuat fungsi dasar DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi ini harus berjalan seiring dan saling mendukung,” komitmennya di hadapan Rapat Paripurna.

Di akhir pidatonya, Bamsoet menyampaikan salam tiga jari yang dia sebut ‘lapangan kerja, sembako murah, dan rumah murah sebagai tujuannya berada di gedung parlemen ini. Ucapan terima kasih ia sampaikan kepada semua Ketua Fraksi di DPR dan juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang ikut hadir menyaksikan pelantikan ini. ■ (mh/sg)

pekan. Ia melanjutkan sisa masa jabatan yang ditinggalkan Setya Novanto untuk periode 2014 hingga 2019.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPR RI yang diberi judul Senayan Pelangi Indonesia, Bamsoet menegaskan bahwa jabatan yang baru diembannya ini sebagai amanah untuk merealisasikan kemajuan dan kesejahteraan negeri. Dengan melibatkan elemen politik, Bamsoet menyatakan, perbedaan politik yang tajam perlu dikesampingkan demi membuka kerja sama yang harmonis.

“Posisi yang terhormat sebagai Ketua DPR RI bukanlah sekadar jabatan atau kedudukan, tetapi sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama, akan sebuah negeri yang lebih maju,

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharianto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita



Bambang Soesatyo Resmi Duduki Jabatan Ketua DPR RI

PENERBITAN

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiyono
PHOTOGRAFER ART
Friedrick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon Bersama Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat Sidang Komite Eksekutif Uni Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Teheran, Iran

Foto: Dok. BKSAP

Organisasi Parlemen Negara Islam Harus Bertaji

Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menginginkan agar organisasi parlemen negara-negara Islam menjadi organisasi internasional yang kuat. Karena itu, delegasi parlemen Indonesia mengusulkan sebuah draft agar Uni Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (The Parliamentary Union of Islamic Countries/PUIC) segera melakukan reformasi dan revitalisasi.

Demikian ditegaskan Fadli Zon saat memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Komite Eksekutif Uni Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Teheran, Iran yang dihelat hingga 17 Januari 2018. Tahun ini, Indonesia menjadi salah satu anggota Komite

Eksekutif, bersama 13 negara lain.

“Kita harus bercermin kepada organisasi-organisasi internasional lain. Mereka bisa memainkan peran yang nyata dalam diplomasi internasional, termasuk dalam membela kepentingan negara-negara yang tergabung dalam grup. Semua resolusi yang mereka hasilkan

juga bersifat mengikat, harus dipatuhi oleh anggotanya. Dengan demikian organisasi jadi berwujud. Nah, PUIC sejauh ini belum menjadi organisasi semacam itu. Makanya Indonesia mendorong agar PUIC segera mereformasi dirinya,” ungkap Fadli dihadapan para delegasi PUIC.

Lebih lanjut Fadli memaparkan, ada banyak permasalahan di negara-negara muslim yang seharusnya PUIC bisa memainkan peranan penting. Namun, hingga kini peran itu tidak bisa dioptimalkan oleh PUIC. Misalnya, ia memberikan contoh, dalam penyelesaian kasus Rohingya atau pengakuan Amerika terhadap klaim bahwa Yerusalem adalah Ibukota Israel.

“Kita tidak melihat peran nyata PUIC. Organisasi ini, yang beranggotakan 54 negara, ternyata tak memiliki taji. Bukan hanya di mata dunia internasional, tapi juga di mata negara-negara anggotanya sendiri. Jadi, ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki dari organisasi ini,” kritisi politisi dari F-Gerindra ini.

Usai memaparkan alasannya, Fadli juga menyampaikan langsung proposal draf resolusi dan menjadi perhatian dalam Komite Eksekutif. Resolusi tersebut akan diakomodasi dalam pernyataan akhir Konferensi PUIC kali ini. Dan semangat melakukan revitalisasi PUIC mendapat dukungan mayoritas anggota Komite Eksekutif.

“Kami senang usulan delegasi DPR RI tersebut disambut hangat oleh delegasi negara-negara lain. Agenda terdekat, kami akan memproses usulan perubahan Statuta PUIC. Seperti halnya ASEAN, organisasi multilateral ini tak punya gigi dan nyali karena tidak pernah mereformasi statuta pendiriannya. Padahal, zaman terus berkembang dan semua itu butuh untuk disikapi,” pungkas Fadli. ■ (ann/s)



Foto: Inkeel/br

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Bulog Harus Atasi Defisit Beras

Peran dan kapasitas Badan Urusan Logistik (Bulog) harus ditingkatkan untuk atasi defisit beras yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Teori impor bila terjadi defisit perlahan harus ditinggalkan.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang dimintai komentarnya di DPR, mengatakan, beras nasional memang sedang mengalami kekurangan. Dan pemerintah harus diingatkan agar tidak selalu mengambil langkah impor untuk menutup defisit beras. “Kita selalu mengingatkan pemerintah jangan ambil jalan pintas yang bila kekurangan selalu impor. Kapan kita mau maju kalau terus terpaku pada rumus yang berlaku, yaitu bila persediaan kurang lalu impor,” katanya, Senin (15/1).

Untuk mengatasi defisit beras, peran

Kapasitas Produksi Sangat Besar, Tak Perlu Impor Beras

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang menyatakan daerahnya sudah mencapai swasembada beras, sehingga siap mengirim stok beras ke 33 provinsi lainnya di Indonesia. Dengan kondisi itu, mestinya perdagangan pangan antar pulau antar provinsi lebih diaktifkan, mengingat luasnya wilayah Indonesia.



“Pulau-pulau di daerah lain banyak penghasil beras. Kapasitas nasional untuk memperbanyak produksi bahan pangan sangat besar, sehingga tak perlu impor,” ungkap Fahri Hamzah kepada pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Menurut Fahri, sebenarnya kata ‘impor beras’ harus dihapus dari program pemerintah, sebab Indonesia masih terlalu sanggup untuk memproduksi pangan. Bahkan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri atau swasembada, tapi sebetulnya bisa menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga negara yang kekurangan pangan bisa mengimpor dari Indonesia, bukan malah sebaliknya.

“Malu kita dari negara-negara yang lebih kecil bisa swasembada dan memenuhi kebutuhan pangannya lebih



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Photo: Iyovati / br

dari kita. Mindset kita harus dibalik,” ungkap Pimpinan Dewan Bidang Korkesra ini.

Isu lain yang mendapat sorotan Fahri adalah banyaknya anak-anak suku Asmat di Papua yang telah menjadi korban campak dan gizi buruk, bahkan hingga meninggal dunia. Menurutnya, lagi-lagi ini merupakan pukulan telak kepada pemerintah dalam banyak hal.

Diantaranya, upaya simbolik pemerintah untuk menarik Papua dalam isolasi dengan pembangunan infrastruktur secara masif, tidak dibarengi dengan langkah-langkah jangka pendek memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan jangka panjang tidak boleh korbakan kepentingan jangka pendek, seperti menjaga kesehatan masyarakat, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta menjaga energi,” tandas Fahri.

Fahri menambahkan, jika betul mobilisasi dana untuk membangun infrastruktur, kenapa sampai ada semacam isolasi sampai kepada terjadinya gizi buruk, berarti masih ada sektor yang ditinggalkan.

“Ini catatan penting, apalagi korban gizi buruk cukup banyak sampai 21 anak. Pemerintah harus semakin banyak *down to earth* (injak bumi), jangan kebanyakan kampanye yang mengabaikan bahwa masyarakat punya keperluan jangka pendek yang harus dipenuhi,” katanya menambahkan. ■ (mp / sf)

Bulog pun menjadi keniscayaan untuk dimaksimalkan. Pemerintah juga diimbau politisi Partai Demokrat ini, agar peduli dan punya keberpihakan pada nasib petani. Dengan memperhatikan petani, kualitas beras nasional bisa ditingkatkan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

Selain itu, sinergitas BUMN bidang pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian juga perlu ditingkatkan. Bangsa ini mestinya sudah mampu memenuhi kebutuhan beras nasionalnya sendiri dengan kualitas yang baik. Sekali lagi teori impor untuk menutup defisit beras harus ditinggalkan, seru Agus lagi.

Ditanya soal data stok beras yang simpang siur dan adanya surplus beras

di Sulawesi Selatan, Agus mengatakan, bila di Sulsel ada surplus beras bisa ditarik ke pusat untuk memenuhi kebutuhan beras di daerah yang sedang defisit. “Surplus di Sulsel harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau di tempat lain ada yang surplus, bisa ditarik ke pusat yang kemudian menjadi stok nasional,” ucapnya mengakhiri wawancara. ■ (mh / sf)



Pimpinan DPR Tetapkan Pimpinan Pansus RUU Kewirausahaan Nasional

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) tentang Kewirausahaan Nasional DPR RI telah menetapkan empat pimpinan Pansus pada Selasa (16/1) dari tiga puluh anggota Pansus.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Fadli Zon

“Setelah melalui lobi fraksi-fraksi secara musyawarah dan mufakat terpilih empat Pimpinan Pansus Kewirausahaan Nasional yakni, Andreas Eddy Susetyo yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua Pansus. Serta tiga orang Wakil Ketua Pansus terpilih, yakni Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Wahyu Sanjaya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, serta HM. Martri Agoeng Anggota DPR RI dari Fraksi PKS,” ujar Wakil Ketua DPR RI bidang koordinator perindustrian dan pembangunan Agus Hermanto usai memimpin rapat Pansus RUU Kewirausahaan Nasional di ruang Pansus C, Senayan, Jakarta.

RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini sejatinya telah masuk dalam Prolegnas 2016 yang merupakan *carry over* dari Prolegnas 2015. Awalnya rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antar Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 13 Mei 2016 memutuskan bahwa Pembahasan

RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini ditugaskan kepada Komisi VI DPR RI.

Komisi VI DPR kemudian dua kali mengajukan perpanjangan waktu pembahasan RUU ini kepada Pimpinan DPR RI, yakni pada tanggal 18 April 2017 dan 25 Juli 2017. Dan, berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 26 Juli 2017 atas usulan beberapa fraksi, RUU ini diputuskan untuk dibahas dalam sebuah Panitia Khusus atau Pansus.

Di sebuah kesempatan, Anggota Komisi V Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan bahwa RUU ini harus segera dibahas dan disahkan mengingat RUU tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan negara, melainkan juga kepentingan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi saat ini Indonesia sudah masuk MEA (masyarakat ekonomi ASEAN). Sehingga dibutuhkan sebuah regulasi yang komprehensif sebagai payung hukum untuk melindungi para pelaku usaha kecil menengah. ■ (ayu/sc)



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Jumat (12/1). Kunjungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah itu diawali dengan meninjau Bandara Rembele, Bener Meriah.

Peninjauan dilanjutkan dengan melihat langsung jalan nasional lintas Gayo Takengon-Bireuen tepatnya di Simpang Teritit, Arul Kulus dan Enang-Enang. Selesai meninjau jalan nasional, Komisi V DPR menuju Bireuen



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah, Aceh

Selain itu, masih kata Sigit, terkait potensi kecelakaan yang tinggi, pihaknya meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk lebih mengalokasikan tambahan anggaran kepada Kabupaten Bener Meriah.

Terkait usulan pangalihan status jalan menjadi jalan nasional yang diusulkan Kabupaten Bener Meriah, Sigit mengatakan, ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu harus dipastikan pembebasan lahan. Dengan adanya peninjauan lokasi ini, diharapkan ada *link and match* dengan program-program pemerintah pusat.

“Untuk rencana pembangunan Jembatan Enang-Enang, dimana tadi kami melihat baru ada desainnya. Nanti Komisi V DPR akan mendiskusikan dengan Direktur Jembatan di Jakarta, dan kita berharap mudah-mudahan bisa secepatnya terealisasi,” harap politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Firmandez mengapresiasi kunspek ini, karena kementerian bisa melihat langsung pentingnya pembangunan infrastruktur di dataran tinggi Gayo ini.

“Kami berharap dengan kunjungan ini, khususnya di Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah yang memiliki potensi namun masih minim infrastruktur, ada terbuka pikiran dari Komisi V DPR dan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah penghasil kopi yang terkenal ke mancanegara ini,” harap politisi F-PG itu.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bener Meriah Ahmadi mengatakan kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui peningkatan berbagai infrastruktur.

Selain itu, ia juga berharap sejumlah program yang diusulkan kepada pemerintah pusat seperti peningkatan dan pembangunan beberapa jembatan di ruas Jalan Nasional Takengon-Bireuen terealisasi pada APBN-P 2018 atau pada tahun anggaran 2019 mendatang.

Kunspek ini juga diikuti Rendy Lamadjido (F-PDIP), Saniatul Lativa (F-PG), Ade Rezki Pratama (F-Gerindra), Hartanto Eddhie Wibowo (F-PD), Nurhayati (F-PPP), Subarna (F-Gerindra) dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura). ■ (brf/sj)

Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur Bener Meriah dan Bireuen

yang juga meninjau Jalan Cot Panglima, Irigasi Pante Lhong, Jalan Nasional Kota Bireuen dan Jembatan Krueng Tingkem Kuta Blang.

“Kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah, dan kami ingin memastikan pelaksanaan yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang direncanakan di DPR. Untuk itu kami dari Komisi V DPR beserta rombongan mitra kerja kementerian berkunjung ke

Kabupaten Bener Meriah ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo saat pertemuan dengan Bupati Bener Meriah Ahmadi beserta jajaran.

Politisi F-PKS itu melanjutkan, proyek-proyek yang sudah disepakati untuk dibangun di Bener Meriah adalah pembangunan jalan nasional Takengon-Bireuen, dimana saat ini telah memasuki tahap lelang dan sejumlah kegiatan lain yang juga sedang dikerjakan.

Inhanas Diharapkan Bisa Imbangi Produk Impor

Industri Pertahanan Nasional (Inhanas) diharapkan bisa mengimbangi produk Alutsista impor. Walau diakui masih jauh untuk mengejar ketertinggalan, namun setidaknya bisa memenuhi kebutuhan Alutsista nasional dalam skala kecil. PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) pada awal tahun ini kembali memproduksi berbagai Alutsista untuk memperkuat pertahanan nasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid yang dimintai komentarnya atas produk terbaru PTDI untuk TNI itu menyambut baik. Menurutnya, ini semakin memperbarui kecanggihan teknologi Alutsista nasional yang digunakan TNI. “Alutsista tentu mengutamakan industri pertahanan nasional. Kalau PTDI bisa memenuhi persyaratan-persyaratan, semakin memperbarui teknologi dalam menciptakan Alutsista yang modern, akan sangat baik,” katanya.

Meutya yang ditemui di DPR, Selasa (16/1), sangat mendukung kerja sama PTDI dengan TNI dalam pengadaan Alutsista tersebut. Pada Januari ini, TNI kembali diperkuat enam pesawat dari PTDI. Masing-

masing persenjataan itu berupa tiga unit helikopter serang, satu unit pesawat CN235-220, dan dua unit helikopter Panther antikapal selam. Diakui politisi Golkar ini, pengadaan Alutsista oleh Inhanas sangat membanggakan.

“Saya kira itu sangat baik. Pada dasarnya kita di Komisi I mendukung penuh adanya industri pertahanan nasional yang digunakan TNI kita. Harusnya industri pertahanan kita bisa mengimbangi produk luar. Sekarang produk luar negeri masih jauh lebih besar daripada industri pertahanan nasional,” ucap politisi dari dapil Sumut I itu.

Meutya menambahkan, memang masih jauh bagi Inhanas untuk mampu memproduksi semua jenis Alutsista sekaligus memenuhi semua kebutuhan pertahanan nasional. Namun, karya putra putri di dalam negeri oleh PTDI



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid

diharapkan selalu dapat dimanfaatkan militer nasional. “Ke depan diharapkan lebih banyak lagi Inhanas memproduksi Alutsista, tidak hanya PTDI. Dengan begitu, banyak perusahaan lokal yang berkontribusi untuk pertahanan nasional,” pungkasnya. ■(mb/sc)



Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais

Komisi I Bahas RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisikan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi sedang dibahas di Komisi I DPR RI. Diharapkan RUU ini bisa ikut menciptakan perdamaian internasional. RUU ini juga merupakan kerja sama lanjutan dari hubungan bilateral kedua negara.

Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais yang memimpin rapat menjelaskan, DPR telah

menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal pembahasan RUU ini. Pemerintah sendiri nanti akan diwakili Menteri Luar

Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU tersebut dengan DPR. Sebelumnya, Rapat Bamus sudah menugaskan Komisi I untuk merumuskan RUU kerja sama pertahanan ini.

“Presiden telah berkirim surat kepada DPR RI terkait RUU ini dan menugaskan Menlu, Menhan, dan Menkum HAM untuk membahasnya bersama DPR. Rapat Pimpinan Pengganti Rapat Bamus 4 Desember lalu, juga telah menugaskan

Komisi I membahas RUU ini,” kata Hanafi saat memimpin rapat dengar pendapat, Selasa (16/1) di ruang rapat Komisi I Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Rapat kali ini menghadirkan tiga pakar untuk memberi masukan atas rumusan RUU tersebut. Ketiganya adalah Huala Adolf pakar Hukum Internasional dari Unpad, Teuku Rezasyah pakar dari Unpad, dan Yon Machmudi pakar dari UI. Masukan dari ketiga pakar sangat

penting sebelum Komisi I bertemu dengan pemerintah untuk membahas RUU kerja sama pertahanan ini.

Menurut pakar, kerja sama pertahanan ini sangat didukung oleh kesamaan religi antara Indonesia dan Arab Saudi. Perlu diketahui bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan anggaran militer terbesar keempat di dunia. Sektor pertahanan selalu berpengaruh terhadap kepentingan nasional kedua negara termasuk posisi ekonomi, sosial, dan budaya. ■(mb/s)



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (Kanan)

Foto: Kamit/br

Verifikasi Faktual Parpol Akan Disesuaikan dengan PKPU

DPR dan pemerintah menyepakati keputusan MK tentang verifikasi faktual untuk disesuaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dengan prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjoe Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman,

Ketua Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Abhan dengan agenda menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual partai politik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

“Kami menyepakati putusan MK, tapi kami menolak dilakukan perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jadi selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017, tentang pendaftaran verifikasi dan kelengkapan partai politik peserta Pemilu DPR dan DPRD yang disesuaikan dengan pasal 172-179 UU 7 Tahun 2017,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, putusan MK terkait verifikasi faktual akan berdampak pada penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Menurut Arief, berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, maka KPU harus menetapkan parpol peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2019. Sementara, verifikasi faktual terhadap 12 parpol yang telah mengikuti Pemilu 2014 memakan waktu hingga berbulan-bulan.

“Dampak putusan MK, maka 12 parpol harus dilakukan verifikasi faktual. Waktu pelaksanaan verifikasi sangat terbatas. Putusan MK itu juga berdampak pada persoalan anggaran,” ujar Arief.

Arief menegaskan, anggaran verifikasi faktual belum tercakup dalam DIPA 2018. Ia mengatakan, kebutuhan anggaran untuk melakukan verifikasi faktual 12 parpol mencapai Rp 66,3 miliar. Rincian anggarannya yakni Rp 314 juta untuk di tingkat provinsi dan Rp 66 miliar di tingkat Kabupaten. “Anggaran terbesar untuk tenaga verifikator, uang harian dan transport,” paparnya. ■(rnm/s)

Perlu Pemetaan Wilayah untuk Tangani Gizi Buruk

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay merasa prihatin dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, baru-baru ini. Saleh menilai kejadian yang menyebabkan 61 anak meninggal dunia itu seharusnya tidak terjadi, apabila pemerintah bisa memetakan dengan benar wilayah yang rawan gizi buruk.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

“Kalau pemerintah bisa memetakan dengan benar, daerah yang rawan gizi buruk hal ini tidak akan terjadi. Jangan sudah terjadi seperti ini, semua orang saling menyalahkan dan menuding. Kita mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah ini dengan benar,” tegasnya sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Lebih lanjut Saleh mengatakan, di tengah pemerintah yang sedang menggalakkan sistem jaminan sosial, pemetaan wilayah rawan gizi buruk

menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan penanganan dengan benar.

“Pemerintah punya banyak program untuk pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, salah satunya program Nusantara Sehat. Maka dari itu pemetaan ini sangat penting,” tandas politisi F-PAN itu.

Selain itu, Saleh juga mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi memastikan akses kesehatan warga. Pemda harus betul-betul mencermati pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena merekalah tulang punggung dan garda terdepan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya lihat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan,” pesan politisi asal dapil Sumut itu. ■(rnm/sf)

Pemerintah Dituntut Kembangkan UMKM

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas serta mampu bersaing di era persaingan bebas seperti sekarang, mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

“UMKM telah menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu pemerintah harus lebih serius mendorong UMKM untuk naik kelas. Pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung penguatan kinerja UMKM dari input, proses dan output-nya,” ungkap Junaidi melalui sambungan telepon kepada



Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly

Parlementaria, Kamis (11/1).

Politisi PKS ini mengakui masih terdapat jarak yang terlampau jauh antara UMKM dan pengusaha besar.

Sehingga ini patut menjadi perhatian pemerintah. “Masih terdapat gap yang terlampau jauh antara kuantitas UMKM dengan usaha besar, pada sisi ini terlihat bahwa terdapat masalah terkait upaya peningkatan kinerja usaha UMKM. Masalah ini bukan saja perlu dipikirkan, tapi perlu tindakan nyata,” paparnya.

Ia mengungkapkan, persoalan klasik masih belum terselesaikan oleh UMKM seperti sumber daya manusia, inovasi produk, permodalan, pendampingan, teknologi, badan hukum sampai dengan akses pasar UMKM harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen. ■(hs/sc)

Asian Games 2018 Momen Capai Target Wisman

Ajang Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia diharapkan dapat memperkuat pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara. Saat ini, konsep yang sedang digalakkan oleh sektor pariwisata adalah masalah pemasarannya, yakni promosi ke luar negeri. Oleh karenanya, Komisi X DPR mendukung konsep Kementerian Pariwisata untuk memberikan anggaran yang lebih besar pada bidang promosi ke luar negeri.

“Fokus pemasaran luar negeri harus memetik hasil yang maksimal, karena dari segi anggaran sudah diberikan. Tentu hal ini dapat menjadi kesempatan untuk memasarkan kepada para atlet Asian Games. Kemenpar harus dapat menangkap momen ini untuk tujuan meraih wisatawan mancanegara yang targetnya pada tahun 2019 adalah 20 juta wisatawan,” ucap anggota Komisi X DPR RI Nuroji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Politisi F-Gerindra itu mengatakan, sekarang ini sudah terjalin sinergi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Salah satu hasil dari kerja sama yang telah dilakukan itu diantaranya adalah mengenai Logo Asian Games 2018 yang dirancang oleh Bekraf.

“Tinggal bagaimana di lapangan nanti menguatkan kerja sama tersebut, terutama pada bidang pariwisata. Saya juga telah melihat di beberapa daerah, terutama di Jakarta, beberapa tempat yang merupakan destinasi pariwisata telah dihiasi



Anggota Komisi X DPR RI Nuroji

logo-logo Asian Games. Itu artinya promosi sudah berjalan,” ujar Nuroji.

Dengan kedatangan para pemain atau atlet-atlet dari luar negeri, maka harus juga disediakan destinasi wisata yang menarik. “Selain itu harus juga diberdayakan dan disinergikan dengan penguatan ekonomi kreatif, seperti pembuatan souvenir, kesiapan hotel, rumah makan dan sektor-sektor pariwisata lainnya,” pungkas politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■ (dep/sj)

Kemenpar harus dapat menangkap momen ini untuk tujuan meraih wisatawan mancanegara yang targetnya pada tahun 2019 adalah 20 juta wisatawan

Rusuh Lapas Lambaro Karena SOP Tidak Berjalan Baik



Tim Kunker Komisi III DPR RI tinjau Lapas Lambaro, Aceh



Foto: Agung/hr

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan, kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, Kamis pekan lalu (4/1) karena SOP tidak berjalan dengan baik dan terabaikan.

“Ini dikarenakan ada napi-napi yang diistimewakan dan napi ini juga memberikan kontribusi untuk napi-napi lainnya, ketika mau dipindahkan lalu mereka bereaksi dan memprovokasi napi-napi lainnya,” ungkap Nasir Djamil usai Tim Komisi III DPR meninjau dan menghimpun informasi di Lapas Lambaro Banda Aceh, Kamis (11/1).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Komisi III melihat akar masalahnya dan bagaimana ke depan mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Karena sepengetahuannya, sudah kedua kali hal serupa terjadi di sini dengan tingkat yang berbeda. Tetapi kerusuhan yang terjadi pekan lalu ini, ada kendaraan polisi yang dibakar.

“Ini menunjukkan mereka tidak main-main membakar mobil polisi. Menurut saya sudah sesuatu yang berani, maka ini harus diusut dan saya pikir Kepolisian dalam konteks penegakan hukum harus tegas dalam hal ini,” tegasnya.

Komisi III DPR, lanjutnya, nanti dalam rapat kerja dengan pemerintah akan meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi pejabat-pejabat terkait yang ada di Aceh yang mengelola Lembaga Pemasyarakatan ini

Terkait dengan adanya fasilitas kamar yang tidak sesuai dan peredaran narkoba di dalam Lapas, Nasir menerangkan itu karena ada pembiaran napi. “Kalau sejak awal dicegah, barangkali ini tidak akan terjadi,” ungkapnya.

“Jadi ada fungsi-fungsi yang diabaikan, tidak disiplin fungsi preventif, seharusnya ada deteksi dini sehingga dapat dilakukan pencegahan barangkali selama ini sedikit lengah sehingga terjadi hal ini,” tambahnya.

■ (as/sc)

Proses Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Tetap Berjalan

Proses penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018 harus tetap berjalan. Sehingga apabila ditemukan calon kepala daerah melanggar hukum, tidak boleh ada penundaan, dan hukum harus tetap berjalan. Hukum tidak boleh dijadikan alat politik.



Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas

“Proses hukum harus tetap berjalan. Tidak ada tersangka bisa ditunda, apalagi saksipun tidak bisa ditunda. Proses hukum itu harus adil dan independen,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas, usai rapat konsultasi dengan penyelenggara Pilkada Serentak 2018 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria. Ia menegaskan, tidak setuju ada penghentian penyidikan terhadap calon kepala daerah yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum. Ia pun menyerahkan hal ini kepada penegak hukum.

“Kita membutuhkan aparat hukum

yang berintegritas, berkeadilan, netral, dan independen. Jadi penegakan hukum harus jalan, kalau salah ya salah. Kalau tidak salah, jangan dicari kesalahan. Penegakan hukum harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Jangan kita menghentikan proses hukum, yang penting netral,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan jajaran reserse di bawahnya untuk sementara tidak mengusut perkara terkait calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak.

Ia tidak ingin persoalan hukum dijadikan senjata pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Namun, operasi tangkap tangan menjadi pengecualian. Tito mengatakan, justru OTT tidak bisa dikesampingkan dalam kondisi apapun karena sifatnya yang aksidental. Apalagi jika calon kepala daerah tersebut menggunakan kekuasaan untuk menyuap pihak penyelenggara atau pengawas. Menurutnya itu merusak demokrasi.

Tito mengaku, mengesampingkan pengusutan perkara terhadap calon kepala daerah dilakukan agar suasana tidak gaduh. Para pasangan calon berlomba-lomba mendapatkan dukungan publik dengan membuat program kerja dan kegiatan yang menarik. ■ (rmm/sf)



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi

Tak Boleh Ada Diskriminasi Energi Dalam Proses Pembangunan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi menegaskan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia pun memastikan, pihaknya juga mempunyai keinginan kuat untuk membangun PLTN.

Kemenag Harus Punya Langkah Strategis Sikapi Kebijakan PPN Arab Saudi

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyikapi kepastian kenaikan ongkos haji oleh Kementerian Agama menyusul pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen mulai tahun 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya Kementerian Agama harus memiliki langkah strategis dalam menyikapi kondisi tersebut.

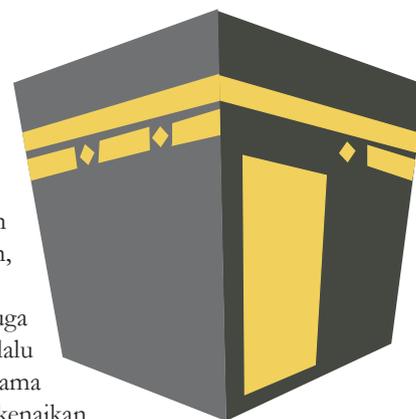


Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna

“Jadi aneh kiranya, jika Kementerian Agama tidak memiliki rancangan langkah strategis menghadapi hal ini,” kata Choirul dalam keterangan singkatnya melalui telepon, Jumat (12/1).

Politisi Nasdem ini juga menjelaskan bahwa terlalu cepat jika Kementerian Agama langsung menetapkan kenaikan ongkos naik haji hanya karena dampak pemberlakuan PPN oleh Arab Saudi. “Padahal masih banyak cara untuk tidak menambah beban calon jemaah haji,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Peraturan yang sudah lama dibahas oleh Pemerintah Arab Saudi ini akhirnya cukup mengagetkan calon jemaah haji di Indonesia. Karena itu, pada Senin mendatang, Komisi VIII akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama terkait isu ini. ■ (hs/sf)



“Kalau DPR diminta untuk memperkuat aspek legislasinya, sejak kami berkumpul di Komisi VII, kita punya keinginan kuat untuk membangun PLTN,” ujar Hadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Batan dan Kepala Bapeten di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Politisi F-PKS itu mengatakan, Komisi VII telah mendapat informasi dari Dewan Energi Nasional, yang dalam kebijakannya mengatakan bahwa nuklir adalah pilihan energi terakhir.

“Padahal seharusnya tidak boleh ada diskriminasi energi dalam proses pembangunan di Indonesia. Saya curiga ini ada faktor politis dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Indonesia maju. Ini harus kita kejar, demi tercapainya kedaulatan energi,” ucapnya.

Ketika diusulkan untuk membentuk kaukus nuklir, hampir semua anggota Komisi VII mendukung kaukus nuklir itu, lanjut Hadi. “Artinya kita punya keinginan kuat untuk membangun yang lebih efektif, efisien, murah dan lebih berkekuatan yaitu PLTN. Kalau ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama, seperti revisi Undang-Undang Ketenaganukliran, maka akan kita prioritaskan,” tandasnya.

Menurut politisi asal dapil Kalimantan Timur itu, justru persoalannya bukanlah pada DPR, melainkan pada pemerintah. Sebab berpuluh-puluh tahun tidak ada kemajuan. Ia menilai ada unsur ekonomi politik yang bekerja dari pihak kapitalis, dan tidak menginginkan industri nuklir Indonesia maju.

“Ini harus kita lawan, sebab mereka

ingin Indonesia selalu terbelakang. Dengan berbagai macam alasan. LSM-LSM diongkosi untuk melawan pembangunan PLTN, agar Indonesia tidak pernah maju. Nanti giliran mereka sudah maju, baru kita bangun PLTN. Maka yang terjadi adalah kita ketinggalan selama 50 tahun. Hegemoni kapitalisme global itu harus kita lawan, salah satunya dengan membangun PLTN,” pungkasnya. ■ (dep/sf)



Komisi V Dukung Pembangunan Jembatan Layang Canguk



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau lokasi pembangunan jembatan layang di Magelang

Komisi V DPR RI mendukung upaya Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, membangun jembatan layang (flyover) di Persimpangan Canguk untuk mengatasi kemacetan dan kesemrawutan arus lalu lintas di kawasan itu.

“Pembangunan jembatan layang tersebut sebagai prioritas, terutama untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan kesemrawutan arus lalu lintas dari Jalan Urip Sumaharjo, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Raya Tegalrejo,” ungkap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat memimpin Tim Kunspek Komisi V ke calon lokasi pembangunan jembatan layang di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (11/1).

Politisi F-Gerindra itu mengatakan,

pihaknya sudah mendapatkan pemaparan tentang rencana pembangunan infrastruktur itu dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Joko Suparno. Pemkot Magelang pun beberapa waktu lalu telah mengusulkan rencana pembangunan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Komisi V mendukung Pemkot Magelang, dan mendorong Kementerian PUPR untuk merealisasikannya, karena

mereka yang akan membangun. Setelah mendengar paparan dari Bappeda, kami pun bisa menerima alasan pentingnya dibangun jembatan layang itu, dan memang membutuhkan dana yang cukup besar,” tambah politisi asal dapil NTT itu.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Magelang Joko Suparno mengatakan, telah cukup lama Pemkot setempat mengusulkan kepada Kementerian PUPR tentang pentingnya pembangunan jembatan layang Canguk.

“Kami telah lama mengajukan proposal kepada pemerintah pusat dan sekarang mendapat lampu hijau. Kami yakin akan terealisasi dengan kedatangan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR ini,” harapnya.



Foto: Inani/ir

Pihaknya memperkirakan bahwa pembangunan jembatan layang dan underpass di Cangkung membutuhkan dana sekitar Rp 119,9 miliar dengan spesifikasi antara lain jembatan layang tepi Sungai Elo sepanjang 340 meter dan lebar 9,4 meter. Rancangannya, flyover untuk arah Yogyakarta - Semarang, sedangkan underpass untuk arah Tegalrejo - Yogyakarta.

Kunjungan Spesifik ini diikuti beberapa anggota Komisi V dengan didampingi Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina, Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Zarkasi, Kepala Bappeda Kota Magelang Joko Suparno dan pejabat lainnya. ■ (iw/sf)

DPR Desak Pemerintah Batalkan Permendag No. 1 Tahun 2018

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

Foto: Jaka/ir

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Direksi Perum Bulog, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

“Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2018 yang meminta perusahaan BUMN lain (PT. PPI) untuk melakukan impor beras, sangat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu kami, Komisi IV meminta agar pemerintah membatalkan permendag tersebut,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk impor beras asal Thailand dan Vietnam dinilai juga telah mengkhianati petani. Menurut Edhy, seharusnya Mendag tidak terburu-buru melakukan langkah impor. Terlebih dahulu harus melihat data, mengingat selama ini pemerintah memberikan banyak anggaran di bidang pertanian yang digunakan untuk menanam.

“Jika ada perbedaan persepsi, ya harus diluruskan, jangan tiba-tiba Impor. Jika 500 ribu ton beras saja sebagaimana yang diputuskan Menndag, daerah lain bisa lebih dari 500 ribu. Sumatera Selatan saja, surplus 1 juta. Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, serta beberapa daerah lain juga dikatakan gubernurnya terjadi surplus beras. Bahkan bupati-bupati menolak masuknya beras impor. Di sini kami ingin katakan bahwa kami tidak anti impor, tapi jangan sampai kita impor disaat yang sama kita membunuh petani. Asosiasi menolak, petani komplain. Kita juga berikan anggaran petani untuk menanam. Mau dijadikan apa mereka?” paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini juga meyakini bahwa kebijakan impor tidak akan menurunkan harga beras di pasaran. Namun justru mematikan kehidupan petani yang sudah berbulan-bulan menanam padi lewat anggaran yang sudah pemerintah berikan.

“Hari ini kita menyuruh mereka menanam, di sisi lain kita mematikan petani, sangat memprihatinkan,” tandasnya. ■ (ayu/sc)

Satgas Pangan Diminta Selidiki Penyebab Tingginya Harga Beras



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena

Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam mengatasi tingginya harga beras dan menambah stok beras nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mensinyalir adanya pihak yang dengan sengaja menyebabkan harga beras menjadi tinggi.

“Satuan Tugas (satgas) Ketahanan Pangan harus bergerak cepat menyelidiki penyebab tingginya harga beras serta mengungkap aktor dan pihak-pihak yang merugikan hajat hidup orang banyak dan masyarakat kecil ini,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Senin (15/1), di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Demokrat ini mengutarakan penjelasan Bulog pada saat Kunjungan Kerja Komisi IV ke Maluku, pada Desember 2017 lalu. Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi menerangkan kondisi stok beras nasional aman, dengan kapasitas 2 juta ton yang saat ini dimiliki Bulog, dan masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena stok

Bulog hingga 2 bulan ke depan akan siap sedia.

Tetapi pada nyatanya setelah memasuki bulan Januari 2018, terjadi hiruk pikuk mengenai rencana impor beras yang ekuivalen dengan yang dijelaskan tersebut.

“Kalau memang dengan stok Bulog yang ada tetapi Januari begitu cepat berubah, siapa yang salah, sampai begitu cepat stok yang ada di Bulog pengurangannya signifikan. Sampai hanya tersisa 925 ribu ton atau angka di bawah psikologis Bulog,” ungkapnya.

Michael ingin mengetahui yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional. Dia juga telah meminta informasi dari Kementerian Pertanian yang menjelaskan hanya melakukan pembinaan produksi padi sampai pra

panen, sedangkan pasca panen bukan merupakan tanggung jawabnya.

Di lain pihak, tanggung jawab Bulog dalam melaksanakan tugas menyerap produksi petani dan menstabilkan harga bukan hanya hari ini, tetapi ini sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Bulog.

Lalu tiba-tiba ada rencana impor beras, sambungnya, sedangkan Menteri Pertanian menyatakan 2 bulan ke depan sudah ada panen. “Komisi IV melakukan pembelaan terhadap petani, lalu kalau sampai hal ini terjadi bagaimana wajah kita di hadapan petani Indonesia, dimana? Bulog harus jeli memandang ini,” katanya.

Ia juga meminta Bulog untuk segera mengirimkan surat kepada Kepolisian dan Satgas Ketahanan Pangan, sehingga Kepolisian dapat cepat mengungkap

Tanggung jawab Bulog dalam melaksanakan tugas menyerap produksi petani dan menstabilkan harga bukan hanya hari ini, tetapi ini sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Bulog.



dan menangkap para spekulator yang menyebabkan tingginya harga beras.

“Kami (Komisi IV) mohon Bulog melibatkan Satgas Pangan, karena mungkin saja mereka tahu, dimana kendala beras ini tidak sampai ke pengecer dan konsumen,” tegasnya. ■(as/se)

DPR Ajak Bawaslu Atasi Kebangkitan Politik Uang dan Isu SARA

Jelang Pilkada Serentak 2018 ini semua pihak mengharapkan hadirnya demokrasi yang berkualitas. Politik uang yang masih terjadi mengakibatkan pada pelaku koruptif saat mendapat jabatan. Selain itu, mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi, dimana politik identitas yang hanya melihat aspek suku ras dan agama (SARA), sehingga mengabaikan ide pembangunan kota, dan hanya menimbulkan konflik sosial. Dalam Pilkada semestinya yang diadu adalah konsep, gagasan, dan program yang dimiliki figur Calon Kepala Daerah.

Menanggapi masalah tersebut, anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengajak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai tombak penegak hukum Pemilu mampu mengatasi kebangkitan politik uang dan isu SARA. Semua pihak bisa memahami bahwa Pilkada damai dan berkualitas adalah Pilkada yang anti politik SARA dan anti politik uang.

“Kita berharap semuanya untuk *concern* mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik uang dan bangkitnya politik SARA, terutama untuk Bawaslu. Tentunya dengan mengajak seluruh pimpinan parpol dengan duduk bersama, yang intinya sama-sama berkomitmen untuk tidak berbasis pada politik SARA dan politik uang,” papar Arif saat rapat gabungan Komisi II dan Komisi III dengan Mendagri, Bawaslu, KPU, Polri dan KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Bawaslu harus benar-benar menjalankan tugasnya untuk mengawasi Pilkada Serentak yang akan digelar pada Juni mendatang. Dan pemilu, seyogyanya terselenggara dengan mekanisme pemilihan oleh publik untuk memilih pejabat publik dengan melihat aspek visi dan misi program, untuk menjawab persoalan-persoalan publik.

“Kalau tidak efektif, saya rasa memang Bawaslu perlu dibubarkan. Karena,

Bawaslu adalah garda terdepan sebagai pimpinan Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) menyangkut sanksi administrasi maupun pidana dalam kepemiluan kita. Kekuasaan Bawaslu kan sudah maju, maka gunakan ini lebih efektif,” ujar Arief.

Langkah preventif sedini mungkin untuk mengatasi politik SARA perlu dikerjakan. Menurut Arief, bangkitnya politik SARA perlu diantisipasi dengan serius. Sebab, masalah SARA dapat memantik konflik sosial, karena menyangkut isu yang sangat fundamental.

“Saya kira dua hal itu yang menjadi *concern* PDI-Perjuangan, terutama dalam hal praktik dan implementasinya. Ini bisa memantik masalah

yang tidak akan selesai dan buruk dalam proses pemilu kita,” tutur politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Selain itu, akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari atas ideal, tetapi, bergeser ke arah nilai transaksional dalam pemilu atau pilkada. Masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah sehingga terbuka dengan politik uang. ■ (eko/sj)



Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo

(Foto: Ranti)

Produksi UU Penting, Namun Harus Sesuai Kebutuhan

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan menghasilkan banyak Undang-Undang (UU) adalah suatu hal yang penting, namun urgensi dan asas proporsionalitas seyogyanya juga diutamakan. Menurutnya, UU yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan.

“Kami kurang sepatkat kalau DPR memproduksi UU sebanyak-banyaknya. UU penting, tapi harus sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan rencana kerja pemerintah, karena pada dasarnya keberhasilan pemerintah juga adalah keberhasilan DPR. “Pemerintah sebagai pelaksana UU, sementara DPR sebagai pembuat UU,” papar Firman kepada Parleментарia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Politisi dari F-Golkar ini menambahkan, di tahun politik ini, dimana Pilkada Serentak akan dilaksanakan di 171 wilayah tentunya akan menyita banyak energi. Sehingga baik DPR maupun pemerintah diminta selektif untuk menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas.

Ia melanjutkan, selektif yang dimaksud adalah selain mengisi kekosongan hukum, tetapi juga mengacu pada rencana kerja pemerintah jangka pendek dan menengah. Menurut Firman, semestinya pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa menjabarkan visi dan misi pemerintah serta UU apa saja yang memang dibutuhkan.

“Misalnya pemerintah sepatkat bahwa 5 tahun itu visinya ini, kemudian Bappenas menyusun konsep baru legalitas aturan hukumnya. Kementerian Hukum dan HAM yang siapkan. Hal seperti ini yang belum terjadi. Kemudian dari situlah kita membagi tugas, mana yang menjadi inisiatif pemerintah, inisiatif DPR, dan DPD. Tidak seperti sekarang ini, semuanya memberikan RUU tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Akhirnya, tumpang tindih seperti ini, itu persoalannya,” urai Firman.

Lebih lanjut, Firman membeberkan

UU yang akan menjadi prioritas di tahun ini. Bagaimana meningkatkan perekonomian nasional, peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan nasional akan menjadi prioritas.

“Itu yang paling mendasar. Yang betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga pada 2019 nanti bisa menjawab keinginan masyarakat bahwa kinerja pemerintah dan DPR bermanfaat bagi masyarakat luas,” tandasnya.

Baleg juga, sambungnya, akan mengundang pemerintah dalam waktu dekat ini untuk mendiskusikan secara bersama RUU yang akan ditargetkan untuk diselesaikan guna mendukung kinerja pemerintah.

“Sebab, RUU itu dirancang bersama-sama pemerintah. Nah, ketika pemerintah tidak proaktif untuk melaksanakan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo

Foto: Inewi/br

pembahasan, maka akan terjadi deadlock. Seperti sekarang ini, RUU Minuman Beralkohol dan RUU Pertembakauan, itu semua macet di pemerintah, padahal harus ada langkah yang kita ambil,” jelasnya.

Politisi dari dapil Jawa Tengah III ini juga mengingatkan pemerintah untuk segera membuat aturan turunan, seperti peraturan pemerintah dari beberapa UU yang sudah disahkan. Sebab, ada beberapa UU yang tidak bisa dijalankan karena belum memiliki aturan turunan. Hal itulah yang menurutnya juga harus menjadi perhatian pemerintah. ■ (ann/sj)

Persoalan Kekurangan Guru Harus Ditindaklanjuti

Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati berharap agar ada tindaklanjut atas persoalan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Esti mempertanyakan, seperti apa roadmap yang akan dibuat untuk penyelesaian masalah guru tersebut, termasuk penyebaran guru.

“Hal ini selalu saya sampaikan pada saat rapat kerja, karena sampai sekarang belum ada progres yang mampu menguatkan dan meyakinkan kita tentang bagaimana dengan persoalan guru itu ke depan,” tandas Esti saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Dalam persoalan kekurangan guru itu termasuk juga didalamnya adalah masalah kesejahteraan guru. Menurut Esti, untuk guru yang PNS mungkin sudah tidak terlalu masalah, namun untuk yang non PNS, diperlukan diskusi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam

Revisi UU ASN Memungkinkan Pengangkatan Honorer Menjadi PNS

RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan RUU Prioritas Prolegnas 2018. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menyampaikan, salah satu poin revisi adalah pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto

“Salah satunya adalah memungkinkan untuk tenaga-tenaga honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun di instansi pemerintah, mereka mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai PNS,” papar Totok sesaat setelah menerima Forum Asosiasi Honorer di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Namun politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini berpesan agar

Persoalan PNS ini terkait dengan data-data yang valid, makanya tadi kami dari Badan Legislasi mengambil inisiatif supaya dari Forum Asosiasi Honorer ini menyerahkan data-data kepada DPR

Forum Asosiasi Honorer menyerahkan data yang valid, nantinya pemerintah juga akan menyampaikan data versi pemerintah.

“Karena persoalan PNS ini terkait dengan data-data yang valid, makanya tadi kami dari Badan Legislasi mengambil inisiatif supaya dari Forum Asosiasi Honorer ini menyerahkan data-data kepada DPR, khususnya yang Kategori K2. Karena di Kategori K2 itu datanya relatif sudah valid sebetulnya, sehingga perlu diverifikasi,” jelas Totok.

Kehadiran Forum Asosiasi Honorer ke Baleg ini seharusnya dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan. Tapi karena pemerintah belum siap, kemudian dijadwalkan kembali minggu depan. “Mereka siap hadir rapat kerja bersama Badan Legislasi,” ujar politisi asal dapil Jawa Timur itu. ■ (eko/sj)

Negeri, Kementerian Keuangan, dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru.

Politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan, disalah satu media, Presiden Joko Widodo pernah meminta supaya kabupaten/kota menyediakan anggaran bagi para guru honorer di tingkat PAUD. Terkait hal tersebut, Esti menyatakan perlu juga ada tindak lanjut terhadap sekolah-sekolah pada tingkatan yang lainnya, yakni SD, SMP, dan SMA.

“Tidak mungkin APBN mampu menyangga semua, tetapi ketika APBN tidak mampu menyangga itu semua, kita perlu membuat regulasi supaya kabupaten/kota dan provinsi mempunyai tanggung jawab untuk memberi anggaran yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang ini. Tanpa regulasi tentu kita akan kesulitan. Kita meminta kepada kabupaten/kota dan provinsi untuk bisa menambah alokasi anggaran itu, sebab problem pendidikan tidak mungkin bisa hanya diselesaikan dengan APBN,” pungkas politisi asal dapil di Yogyakarta itu. ■ (dep/sj)



Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati

Setjen DPR Terima DPRD Probolinggo dan DPRD Batanghari



Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti memberikan masukan dan mendengar kendala terkait dengan tugas dan fungsi Bamus (Badan Musyawarah) serta perancangan anggaran daerah kepada Anggota DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi.

“Sudah banyak anggota DPRD yang berkunjung ke sini karena ingin mempelajari dan meniru Bamus DPR RI, karena Bamus di DPR RI sangat menginspirasi,” tutur Damayanti usai pertemuan di ruang rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1).

Maya, begitu Damayanti akrab disapa, menjelaskan Bamus DPR RI terdiri dari Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi. Jumlah anggota Bamus 1/10 dari jumlah anggota DPR. Bamus memiliki tugas antara lain menetapkan kegiatan selama masa sidang dalam satu masa sidang dan menentukan mitra kerja untuk komisi pada awal periode.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR Djaka

Dwi Winarko juga menanyakan Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Hal ini yang tidak dimiliki oleh anggota DPR RI.

“Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan saat ini hanya ada di kota dan kabupaten, sehingga kami ingin mendapatkan bagaimana cara mengajukan dana tersebut,” tanya Djaka.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan menjelaskan, dalam pengajuan dana Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan memiliki mekanisme yang panjang. Dimulai dari kunjungan anggota DPRD ke masyarakat saat masa reses untuk menghimpun aspirasi rakyat, yang dilanjutkan pengajuan proposal dan dibahas dalam Musrenbang untuk pengajuan dana aspirasi tersebut.

Mukhlas juga mengeluhkan regulasi yang sulit dan panjang dalam pengajuan anggaran, sehingga mengakibatkan sering terlambatnya APBD. “Untuk menyusun APBD kami harus melewati empat tahap dan juga harus menunggu selesainya audit dari BPK, sehingga membutuhkan waktu yang lama,” tutur Mukhlas.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Batanghari Uswaini juga menuturkan beberapa masalah, salah satunya terkait regulasi yang panjang dalam penyusunan APBD-Perubahan. Permasalahan berikutnya, minimnya jumlah kedatangan anggota DPRD saat Rapat Paripurna. Namun kedatangan anggota akan maksimal jika Rapat Paripurna mengagendakan pengambilan keputusan. Anggota DPRD Batanghari Uswaini memaparkan tugas anggota DPRD yang tidak sedikit.

“Bukan hanya mengurus pembentukan peraturan daerah dan menetapkan belanja kabupaten atau kota, melainkan masih banyak tugas yang dikeluhkan oleh warga, mulai dari hal pembebasan biaya rumah sakit, anak yang belum bayar sekolah hingga STNK kendaraan yang mati,” tandas Uswaini. ■ (rh/sj)

“Kehadiran para guru besar, dosen dan mahasiswa UPI Bandung yang berjumlah sekitar 300 orang ini adalah sebagai wujud antusiasme, perhatian dan kecintaan masyarakat kepada DPR RI,” katanya saat menerima kunjungan UPI Bandung bersama anggota Komisi II Hetifah Sjaifudian dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk di Ruang Abdul Muis Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut politisi Golkar ini, kunjungan ini sesuai dengan harapan DPR sebagai rumah akyat yang senantiasa menyuarakan, memperjuangkan, mengartikulasikan, mengagregasikan semua aspirasi dan tuntutan dari rakyat, agar rakyat Indonesia betul-betul berdaya, sejahtera dan kemudian betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan dan peran dari DPR itu.

Deding juga mengatakan, bahwa output yang diharapkan dari kegiatan seperti ini adalah adanya timbal balik kepada mahasiswa beserta tenaga pengajar yang ada didalamnya soal tambahan informasi terkait praktek ketatanegaraan, praktek terhadap proses keberadaan dan peran DPR RI dalam periode saat ini.

Dan bagi DPR RI sendiri, dirinya menyatakan bahwa semua hal yang didiskusikan di dalam forum ini merupakan masukan dan pandangan-pandangan yang orisinal, penting dan positif bagi upaya perbaikan pembenahan DPR RI sebagai lembaga negara yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Sehingga, pertemuan ini menjadi sangat bermanfaat.

“Mudah-mudahan silaturahmi komunikasi pertemuan seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari upaya penguatan DPR. Umpamanya sekarang boleh digagas dan disepakati adanya kerja sama antara Kesetjengan khususnya BKD dengan UPI Bandung dalam kontek



Foto: Krean/br

Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak bersama Anggota Komisi II Hetifah Sjaifudian dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk

Kunjungan UPI Bandung Wujud Kecintaan Kepada DPR

Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menyatakan kunjungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sebagai wujud antusiasme, perhatian, dan kecintaan masyarakat kepada DPR RI.

penguatan tenaga ahli di DPR ini suatu langkah yang positif konkret,” paparnya.

Sementara itu dalam acara yang difasilitasi Humas Sekretariat Jenderal DPR RI ini, anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan motivasi kepada para mahasiswa UPI Bandung khususnya para mahasiswinya yang diharapkan mampu menjadi perwakilan perempuan-perempuan yang turut mendedikasikan dirinya

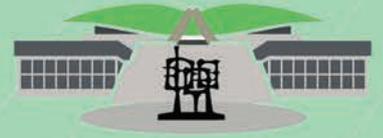
di kancah politik. Dirinya juga berharap perempuan-perempuan yang mencalonkan dirinya di pesta demokrasi tidak saja berkompetensi, akan tetapi juga memiliki jiwa kontestasi yang siap memenangkan persaingan di dunia politik.

“Di politik inikan sekarang masih sangat maskulin, walaupun kita sudah memberikan suatu afirmasi khususnya didalam proses kandidasi atau

pencalonan. Sekarangkan minimal 30% perempuan tetapi kalau kami melihat, walaupun calonnya sudah lebih dari 37% di 2014 yang lalu, kan prakteknya hanya sekitar 18% saja yang terpilih,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, perempuan-perempuan yang menjadi calon itu bukan saja dia mempunyai kompetensi tapi juga dia siap berkontestasi atau siap memenangkan suatu persaingan di dalam politik.

“Apalagi sekarang mau pilkada, perempuan sedikit sekali, jauh lebih sedikit hanya sekitar 7% dari 3 kali pilkada serentak itu, perempuan ngga pernah lebih dari 7%. Karena memang untuk bisa dicalonkan saja didalam pilkada itu sangat sulit dan tidak ada afirmasi seperti pencalonan pemilihan legislati (Pileg),” tutupnya. ■ (udy/sc)



Ketua DPR Bambang Soesatyo melantik Anggota Pengganti Antar Waktu, Melda Addriani (FPG), periode 2014 -2019, Senin (15/1). *Foto : Jaka & Iwan/hr*



Rapat Gabungan antara Pimpinan DPR RI, Komisi II DPR, dan Komisi III DPR dengan Kapolri, Mendagri, KPU, Bawaslu, KPK, dan Jampidum Kamis (11/1). *Foto : Runi/hr*



Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menerima Perwakilan Delegasi Parlemen Korea, Rabu (17/1). *Foto : Arief/hr*